

Penggunaan dan selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan. Sedangkan PT Grab Indonesia hanya bertanggung jawab pada penggunaan teknologi aplikasi yang disediakan, contohnya tanggung jawab atas data dan informasi pribadi konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut, bukan pada penyelenggaraan angkutan umumnya. PT Grab Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk berinovasi menemukan solusi baru. Kini PT Grab Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Pialang Asuransi Berlisensi PT Futuready Insurance Broker (FIB).

4. Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan BPKN

1. Melalui konsiliasi

konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan lembaga hukum untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

2. Mediasi

mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa konsumen yang berada diluar pengadilan dengan perantara lembaga hukum yang dimana hanya sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini yang dimana inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis lembaga sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan di sini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Diharapkan peran perusahaan penyedia jasa transportasi *online* untuk proaktif dalam memperhatikan hak-hak konsumen. Pengangkutan transportasi jalan online sehingga terjadi keselarasan akan hak dan

kewajiban antara penumpang dan perusahaan penyedia jasa angkutan transportasi jalan online demi terciptanya hubungan yang baik antara penumpang dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan secara online serta pemerintah

2. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi *online* dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (online), PT Gojek Indonesia dan PT Grab Indonesia harus menerapkan dan segera menyesuaikan diri dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

